

Adakan Rembuk Nasional Bagi Pendidikan Usia Dini, 'Aisyiyah Undang Perwakilan Wanita Katholik dan Budha

Kamis, 18-05-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Dunia internasional telah menyepakati tentang perlunya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kesepakatan ini terdapat dalam Komitmen Education for All (Thailand 1990), Deklarasi Dakar Senegal (2000) serta Komitmen World Fit For Children (New York 2002). Disampaikan Masyitoh Khusnan, Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah bahwa konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 20 November 1989, juga telah menyepakati prinsip-prinsip hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

“Sebelum UU digulirkan dan berbagai Komitmen disepakati serta dicanangkan sebagai sebuah komitmen nasional maupun internasional, keterlibatan Aisyiyah dalam penyelenggaraan PAUD sudah dimulai. Karena sejak 1919, tepat dua tahun setelah kelahiran organisasi, Aisyiyah telah memelopori mendirikan Sekolah Frobel,” terang Masyitoh, dalam acara Rembuk Nasional Anak Usia Dini yang diselenggarakan PP 'Aisyiyah bertempat di Hall Universitas 'Aisyiyah (UNISA), Kamis (18/5).

Kembali dijelaskan Masyitoh, dalam kegiatan pendidikan yang kemudian merupakan komitmen dan strategi 'Aisyiyah untuk dapat beriringan dan bahkan jauh berada di depan seperti ketika memelopori berdirinya sekolah Frobel pada 100 tahun yang lalu. Tentunya kompleksitas kehidupan masyarakat yang dinamis, merupakan tantangan tersendiri bagi organisasi perempuan Muhammadiyah ini, untuk terus menggulirkan komitmen dan kotribusinya terhadap dunia pendidikan anak usia dini.

Sejalan dengan peningkatan kuantitas, 'Aisyiyah juga melakukan peningkatan secara kualitas. Berbagai kegiatan seperti seminar, kajian-kajian terus dilakukan dalam rangka menajaring pemikiran dan konsep untuk pengembangan PAUD Aisyiyah.

“Rembuk Nasional PAUD yang digelar hari ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tersebut,” pungkas Masyitoh.

Sementara itu, Justina Rostiawati Ketua Presidium Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI menyampaikan bahwa Wanita Katolik sebagai organisasi kemasyarakatan mengambil bagian dalam mengejawantahkan nilai-nilai ASG.

“Prinsip dasar Gereja Katolik yang membimbing dan menggerakkan organisasi agar mampu menghadirkan diri di tengah masyarakat dan menyikapi realita kehidupan dalam berbagai bentuk karya sosial kemanusiaan,” ungkapnya.

Nilai-nilai ASG ini, lanjut Justina sudah tertuang dalam visi dan misi Wanita Katolik RI, sehingga menjadi pedoman dan prinsip dasar dalam menjalankan organisasi, dari mengembangkan program sampai dengan menyelenggarakan kegiatan, serta menata kelola organisasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting.

“Oleh karena itu, nilai keutamaan tersebut dikembangkan dan diajarkan lewat pendidikan usia dini sejak dari keluarga sampai pendidikan tingkat pertama yaitu PAUD/TK dan SD,” jelasnya.

Sementara itu, Sutarni perwakilan dari Wanita Budhis Indonesia (WBI) menyampaikan pendidikan karakter di sekolah berbasis Buddhis yang selama ini dilakukan yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai

karakter yang dapat diajarkan tentang Brahma Vihara yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upekkha.

“Selain itu peserta didik diajak untuk meningkatkan perkembangan nilai-nilai spiritual melalui puja bakti setiap hari,” terangnya.

Internalisasi nilai-nilai Brahma Vihara dilakukan dengan memberi pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya cinta kasih dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Ia mencontohkan bila melihat binatang kecil atau serangga diusahkan tidak membunuh.

“Cinta kasih dapat dikembangkan agar anak menyayangi orang tua, adik kakak, teman pembantu rumah tangga, tetangga, orang lain, juga diri sendiri,” ungkapnya.

Tujuan pendidikan karakter yang ditanamkan dalam secara umum menurut Sutarni yang pertama ialah mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Kedua, mengembangkan pembiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal, dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang religious. Ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.

“Terakhir yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity),” pungkas Sutarni. **(adam)**